



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M
Dengan	: Dirjen PHU, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Dirut Pertamina, Dirut PT. Airnav Indonesia, Dirut Angkasa Pura I dan Dirut Angkasa Pura II.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 15 November 2023
Waktu	: 10.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Rincian Komponen Penerbangan BPIH Tahun 1445 H/ 2024 M
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 17 dari 28 Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat Panja BPIH membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dengan didampingi Para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dengan **DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA RI, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENHUB RI, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENHUB RI, DIREKTUR PT. ANGKASA PURA I DAN II, DIRUT PT. AIRNAV INDONESIA, DAN DIREKTUR PEMASARAN PUSAT NIAGA PERTAMINA**, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal PHU Kementerian Agama RI menyampaikan kebijakan tentang pelayanan haji yang berkaitan dengan transportasi udara dalam taklimatul Haj dan proses penyediaan transportasi udara haji.
2. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI menyampaikan berbagai kebijakan mengenai syarat transportasi udara yang meliputi : persyaratan administratif, standar kelaikudaraan dan standar pelayanan.
3. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI mendukung dan membantu penentuan rute antar embarkasi dan debarkasi di tiap kabupaten/kota. Kemudian membantu penempatan petugas Dirjen perhubungan Darat pada simpul-simpul/terminal naik/turun para Jemaah haji baik di Indonesia dan Saudi Arabia dalam rangka mendukung mobilitas Jemaah Haji Indonesia.
4. Direktur Pemasaran Angksa Pura (AP) I menyampaikan peran AP I dalam rangka memastikan kelancaran proses pelayanan Jemaah Haji seperti kemandirian, keselamatan dan penanganan penumpang dan barang.
5. Direktur Angkasa Pura (AP) II menyampaikan persiapan ke-enam Bandara di AP II terutama kesiapan Bandara Kertajati Provinsi Jawa Barat yang akan beroperasi penuh dalam pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M.
6. Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi PT Airnav Indonesia membawahi 13 Embarkasi secara Nasional. Menyampaikan terkait skema dan navigasi penerbangan dalam rangka membantu pelaksanaan Ibadah Haji 1445 H/2024 M.
7. Direktur Pemasaran Pertamina telah membentuk Satgas Haji 1445 H/2024 sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan Ibadah haji 1445 H/2024 M. Mempersiapkan

infrastruktur depot pengisian pesawat udara dalam penerbangan Haji 2023. Memastikan ketersediaan stock dan kelancaran suplay yang dibutuhkan seperti jumlah flight, periode haji dan estimasi kebutuhan fuel.

8. Panja Komisi VIII DPR RI tentang BPIH Tahun 1445 H/2024 M menyampaikan pandangan dan masukan sebagai berikut :
 - a. Melakukan simulasi dan skema penerbangan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah Haji tahun 1445 H/2024 M.
 - b. Perbaiki Runway Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah Haji tahun 1445 H/2023 M.
 - c. Melakukan penghitungan dan kualitas komposisi Bus yang digunakan oleh para Jemaah haji Indonesia.
 - d. Melakukan penghitungan ulang terhadap biaya Avtur yang menyebabkan biaya penerbangan menjadi naik.
 - e. Mengikutsertakan maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia dan Saudi Arabia dalam rangka mencegah monopoli penerbangan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 H/2023 M.
 - f. Mengkaji ulang durasi lama tinggal Jemaah haji terkait dengan kesiapan Bandara yang ada di Arab Saudi.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.55

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI BPIH TAHUN 1445 H/2024 M
KETUA,**



LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.